

# **KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI KABINET PEMBANGUNAN I (1968-1973)**

**Penulis 1 : Dwi Agung Kurniawan**

**Penulis 2 : Zulkarnain, M. Pd.**

Universitas Negeri Yogyakarta

[dwiagungkurniawanz@gmail.com](mailto:dwiagungkurniawanz@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) terbentuknya Kabinet Pembangunan I 1968-1973, (2) pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri Kabinet Pembangunan I 1968-1973, (3) berakhirnya Kabinet Pembangunan I 1968-1973.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo. Tahap pertama ialah menentukan topik penelitian. Tahap kedua ialah heuristik atau pengumpulan sumber. Tahap ketiga ialah verifikasi atau kritik sumber. Tahap keempat ialah interpretasi atau penafsiran. Tahap terakhir ialah historiografi atau penulisan sejarah.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Terbentuknya Kabinet Pembangunan I 1968-1973 meliputi kondisi politik awal Pemerintahan Kabinet Pembangunan I, proses terbentuknya Kabinet Pembangunan I, dan Struktur dan program kerja Kabinet Pembangunan I. Kabinet Pembangunan I terbentuk setelah Kabinet Ampera dibubarkan. Awal pemerintahan kabinet baru ini masih memasuki masa transisi dari kepemimpinan Orde Lama, sehingga kondisi politik tidak stabil. Program kerja kabinet ini mestabilkan kondisi ekonomi dan politik melalui Panca Krida. (2) Pelaksanaan Kebijakan Politik dalam negeri Kabinet Pembangunan I (1968-1973) meliputi, pembangunan bidang ekonomi, penentuan pendapat rakyat, pemilu 1971, dan fusi partai. Sesuai program utamanya yaitu memperbaiki stabilitas ekonomi dan politik. Ekonomi yang memandang keluar, diharapkan investor asing masuk. Penyelesaian masalah Irian Barat sebagai tindak lanjut dari *New York Agrrement*. Pelaksanaan pemilu sebagai salah satu wujud demokrasi. Fusi partai dilakukan untuk menstabilkan kondisi politik melalui penyatuan program dan tujuan. (3) Berakhirnya Kabinet Pembangunan I meliputi dampak dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, dan proses berakhirnya kabinet. Kebijakan Politik yang telah terlaksana memberikan dua dampak yaitu positif dan negatif satu masalah selesai, permasalahan lain muncul. Kabinet pembangunan I dapat dikategorikan sebagai kabinet yang paling stabil diantara kabinet sebelumnya sesuai dengan masa pemerintahannya.

Kata kunci: *Kebijakan Politik Dalam Negeri, Kabinet Pembangunan I, Orde Baru, Tahun 1968-1973.*

## **THE POLITICAL POLICY OF DOMESTIC THE FIRST PEMBANGUNAN CABINET (1968-1973)**

### **ABSTRACT**

This study aims to determine: (1) the establishment of the first Pembangunan Cabinet from 1968 to 1973, (2) the implementation of domestic policy the first Pembangunan Cabinet from 1968 to 1973, (3) the end of the first Pembangunan Cabinet from 1968 to 1973.

The study employed the historical method according to Kuntowijoy. The first was the research topic selection. The second was heuristics or source collection. The third was verification or source criticism. The fourth was interpretation. The fifth was historiography or history writing.

The results of this study are: (1) Establishment of the first Pembangunan Cabinet from 1968 to 1973 covering the initial political conditions Governance the first Pembangunan Cabinet, the process of formation of the first Pembangunan Cabinet, and the structure and work program of the first Pembangunan Cabinet. The first Pembangunan Cabinet formed after the Ampera Cabinet dissolved. The beginning of the

new cabinet is still in the transitional period of the Old Order leadership, so that the political situation is not stable. The work program of the cabinet stabilize the political and economic conditions through Panca Krida. (2) Implementation of Foreign Policy in the Political the first Pembangunan Cabinet (1968-1973) covers, economic development, referendum, election of 1971, and the fusion of the party. Corresponding main program is to improve economic and political stability. Economic looked out, foreign investors are expected to enter. Settlement of the West Irian problem as a follow-up of New York Agreement. Of implementation of the elections as a manifestation of democracy. Fusion party done to stabilize the political situation through the unification of programs and goals. (3) The end of the first Pembangunan Cabinet include the impact and the success rate of the implementation of the policies and processes of the end of the cabinet. Political policies that have been implemented to give two positive and negative impacts that the problems have been other problems arise. The first Pembangunan Cabinet of one cabinet can be categorized as the most stable among the cabinet in accordance with previous reign.

**Keywords:** *the political policy of domestic, the first Pembangunan Cabinet, the new order, in the 1968-1973*

## I. Pendahuluan

Orde Lama merupakan sebutan bagi rezim kekuasaan Soekarno yang berakhir dengan adanya peristiwa G 30 S pada tahun 1965, yang berbuntut masalah dalam pemerintahan Soekarno. Selain itu juga terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya seperti sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Banyak rakyat yang menuntut adanya perubahan di segala bidang. Para pemuda, mahasiswa dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) semakin marah. Mereka menyebut dirinya Angkatan 66 dan melakukan demonstrasi 12 Januari 1966 dengan mengajukan tuntutan yang terkenal dengan Tritura (tiga tuntutan rakyat) antara lain: (1) bubarkan PKI; (2) bersihkan Kabinet dari unsur PKI; (3) turunkan harga dan perbaiki ekonomi.<sup>1</sup>

Presiden Soekarno mengadakan *reshuffle* Kabinet Dwi Kora untuk memenuhi tuntutan Angkatan 66. Tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan susunan kabinet baru yaitu Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Kabinet ini sebagai pengganti Kabinet Dwi Kora. Namun, dalam kabinet ini ternyata memperkuat posisi orang-orang atau menteri-menteri yang menjabat. Hal ini menuai demonstrasi besar-besaran Angkatan 66 pada tanggal 24 Februari 1966.

Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 24 Februari 1966, bersamaan dengan adanya pelantikan Kabinet 100 Menteri, maka Presiden Soekarno membubarkan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) tanggal 26 Februari 1966 dan tanggal 3 Maret 1966 Universitas Indonesia ditutup (kuliah ditiadakan) mahasiswa tidak boleh berkuliah selama kampus ditutup. Hal ini malah menyebabkan mereka menuntut TRI TURA lebih gencar lagi. Sebagai puncaknya adalah kejadian 11 Maret 1966, yaitu keluarnya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ginandjar Kartasasmita, dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid III 1965-1973*. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1976), hlm. 79.

<sup>2</sup> Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 292-293.

Keadaan ini berakhir dengan di-*reshufflenya* Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan pada tanggal 28 Maret 1966 sekaligus Kabinet 100 Menteri itu *domissioner* diganti kabinet baru bernama Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan lagi. Berarti kabinet ini merupakan Kabinet Dwi Kora yang ke-3.<sup>3</sup> Dapat diartikan bahwasanya kondisi politik masa Kabinet Dwi Kora tidak stabil.

Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan lagi, pemerintahannya hanya berlangsung sekitar 4 bulan saja yaitu 28 Maret-25 Juli 1966. Namun, kabinet ini berhasil meluruskan kembali jalannya pemerintahan dan penyelewengan dari Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya sidang MPRS, yang menghasilkan Ketetapan Nomor XIII/MPRS/1966 yaitu tentang kabinet Ampera, landasan, program, dan tugasnya.<sup>4</sup> Selanjutnya yaitu Kabinet Ampera, tugas pokok kabinet ini tertuang dalam “Dwi Dharma”, yaitu menciptakan kestabilan ekonomi dan politik. Kestabilan dalam bidang politik, dilakukan kabinet ini dengan meneruskan penumpasan PKI, dan menghilangkan dualisme kepemimpinan revolusi. Dan pembangunan ekonomi difokuskan pada pemenuhan sandang pangan.

Hal ini tentu sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa karena dapat menimbulkan perang saudara. Upaya untuk mencegahnya adalah pada tanggal 12 Maret 1967, para wakil rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Surat Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, yakni mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden dan menonaktifkan Soekarno dari jabatan presiden.

Satu tahun kemudian MPRS menyelenggarakan sidang istimewa. Salah satu keputusan terpenting sidang istimewa adalah memberhentikan Soekarno. Sejak saat itu, Soeharto resmi menjadi presiden dengan tugas utamanya menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) secepatnya. Keputusan penting yang mengakhiri dualisme kepemimpinan ini tertuang di dalam TAP MPRS No. XLIV/PMPRS/1968.<sup>5</sup>

Sesuai dengan TAP MPRS No. XLIV/PMPRS/1968 Jenderal Suharto yang sebagai pejabat Presiden ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 5 tahun (1968-1973) dan dilantik pada tanggal 27 Maret 1968. Menurut TAP MPRS No. XLIV/PMPRS/1968 kabinet yang harus dibentuk adalah Kabinet Pembangunan. Program kerja kabinet ini ditetapkan oleh Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968 pasal 1 yaitu: (a) menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan rencana pembanguna lima tahun dan pemilu umum; (b) menyusun dan melaksanakan pembangunan lima tahun; (c) Melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968; (d) mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30 S dan setiap perongrongan, penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Presiden

---

<sup>3</sup> Departemen Penerangan. *Susunan Kabinet dan Program Kabinet RI Selama 25 Tahun 1945-1970*. ( Jakarta: Pradnja Paramita, 1970), hlm. 38.

<sup>4</sup> Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 312.

<sup>5</sup> Abdul Syukur, dkk, *Indonesia dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2009), hlm. 56.

1945; (e) melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh Aparatur Negara dari tingkat pusat sampai daerah.<sup>6</sup>

Tugas awal kabinet pembangunan ini merupakan warisan dari kabinet sebelumnya, yaitu kabinet Ampera yang mengedepankan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Krisis perekonomian yang terjadi juga warisan rezim terdahulu, masa Demokrasi Terpimpin. Pemerintahan masa Demokrasi Terpimpin belum berhasil menyelesaikan krisis perekonomian hingga diteruskan pada masa Orde Baru.

Permasalahan sengketa Irian Barat yang belum tuntas sejak tahun 1949 hingga tahun 1962 yaitu dengan disepakatinya persetujuan New York 15 Agustus 1962.<sup>7</sup> Berbagai bentuk perjuangan dilakukan baik dipomasi maupun konfrontasi fisik. Sesuai dengan perjanjian New York, pada tahun 1969 rakyat Irian diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam kesatuan RI atau memisahkan diri dari RI yang biasa disebut PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat). Perihal tersebut menjadi tugas yang harus diemban Kabinet Pembangunan I 1968-1973.

Sebagai salah satu upaya pembangunan dan negara yang berdemokrasi tentu dibutuhkan penguatan demokrasi itu sendiri. Maka dari itu, pemerintahan Kabinet pembangunan I mencanangkan adanya Pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 partai, bertujuan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Hal yang menarik dari Pemilu 1971 ini adalah kemenangan mutlak Golongan Karya (GOLKAR).

Penyederhanaan partai juga dilakukan oleh kabinet ini pada tahun 1973. Rezim sebelumnya, yaitu masa kepemimpinan Soekarno juga pernah mengadakan penyederhanaan partai. Proses mempersatukan atau menyederhanakan partai sukar dilakukan, dikarenakan tiap partai memiliki ideologi dan kepentingan politik masing-masing.

Penulis tertarik membahas tentang Kabinet Pembangunan I ini, dikarenakan kabinet tersebut terbentuk melalui proses yang sangat panjang melalui berbagai dinamika politik yang tentunya belum stabil. Sebelum kabinet ini lahir terjadi dualisme kepemimpinan antara Ir. Soekarno dan pengembang Supersemar, Jendral Soeharto. Sehingga penulis ingin mengetahui kebijakan politik dalam negeri kabinet pembangunan I ini dalam menciptakan kestabilan kehidupan bangsa dan negara. Pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bisa diketahui dampak dan tingkat keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut dalam memperbaiki kestabilan politik saat itu.

## **A. Kajian Pustaka**

Penulisan karya ilmiah diperlukan kajian pustaka. Kajian pustaka ditujukan agar penulis dapat memperoleh data-data dan informasi yang selengkap-lengkapannya mengenai permasalahan yang dikaji. Penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini.

Pembahasan mengenai sejarah terbentuknya Kabinet Pembangunan I, sesuai dengan rumusan masalah yang pertama yaitu menjelaskan terbentuknya Kabinet

---

<sup>6</sup> Bibit Suprpto, *op.cit.*, hlm. 313.

<sup>7</sup> Moedjanto. *Indonesia Abad ke-20: Dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELTA III*, (Yogya,karta: Penerbit Kanisius, 1988), hlm. 124.

Pembangunan I dengan menggunakan buku karangan Bibit Suprpto yang berjudul *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia* yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia, tahun 1985. Buku ini berisi tentang perkembangan kabinet-kabinet yang ada di Indonesia mulai dari pertama, Kabinet Presidensial hingga Kabinet Pembangunan IV, dan dilengkapi dengan program kerja serta struktur kabinet.

Buku lain yang digunakan yaitu buku karya Mohtar Mas'Oed yang berjudul *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*, diterbitkan oleh Penerbit LP3S pada tahun 1989. Buku ini berisi tentang kebijakan pembangunan Kabinet Pembangunan I yang mencakup kondisi perekonomian dan tindakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Kondisi politik awal pemerintah tidak stabil dan diperlukan pembangunan ekonomi sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut.

Pembahasan mengenai pemilu, penyederhanaan partai, dibahas dalam buku karangan Moedjanto yang berjudul *Indonesia Abad ke-20 II: Dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELTA III* yang diterbitkan oleh Penerbit Kanisius, tahun 1985. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai, yang dimenangkan oleh Golkar. Setelah pemilu 1971, pemerintah mengeluarkan kebijakan berup fusi partai pada tahun 1973, dari 10 partai menjadi 3 partai saja, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Buku karya Tuhana Taufik yang berjudul *Mengapa Papua Bergolak?* Yang diterbitkan oleh Gama Global Media pada tahun 2001. Buku tersebut berisi tentang pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang diadakan pada tahun 1969. Pelaksanaan PEPERA berada dalam pengawasan PBB, yang dipegang oleh UNTEA. Hasil Pepera dimenangkan oleh Indonesia, dan Irian Barat berintegrasi ke dalam wilayahnya.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tahap-tahap metode sejarah yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap. Lima tahap dalam metode sejarah dalam melakukan penelitian sejarah antara lain pemilihan topik, heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan penulisan (historiografi).<sup>8</sup>

### **1. Pemilihan topik**

Topik sebaiknya didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.<sup>9</sup> Kedekatan emosional yang mendasari penulis memilih topik ini karena kegiatan peneliti sebelumnya pernah mengenal dunia pers kampus tingkat fakultas. Kedekatan intelektual yang mendasari penulis memilih topik ini adalah karena penulis merupakan mahasiswa pendidikan sejarah.

### **2. Pemilihan Sumber**

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskein* yang artinya menemukan.<sup>10</sup> Tahap heuristik adalah tahap untuk mengumpulkan sumber, jejak-jejak sejarah yang diperlukan. Bertujuan agar penulisan sejarah berdasarkan sumber-sumber yang relevan, jelas, lengkap, dan menyeluruh. Pengumpulan sumber harus berdasarkan jenis penelitian yang dikaji. Sumber primer dalam penelitian ini menggunakan arsip dari

---

<sup>8</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>10</sup> Sardiman A.M, *op.cit.*, hlm. 101.

Lembaga Pemilihan Umum, buku yang ditulis pelaku dan saksi sejarah, dan majalah. Sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini berupa buku-buku, majalah dan surat kabar yang menjadi acuan dalam penelitian.

### **3. Verifikasi**

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyaring secara kritis data-data yang telah diperoleh dengan cara kritik sumber. Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentitas dan kredibilitas sumber.<sup>11</sup> Kritik sumber dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk mengetahui apakah sumber yang telah ditemukan itu otentik (asli) atau tidak. Hal ini bisa dilihat dari segi bentuk, bahan, bentuk tulisan, dan sebagainya. Kritik internal adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya apakah isi dokumen dapat dipercaya atau tidak. Kritik internal ditujukan untuk memahami isi teks.

Langkah pertama yaitu melakukan kritik ekstern untuk menguji keotentikan sumber. Peneliti menemukan arsip Lembaga Pemilihan Umum yang berisi tentang pelaksanaan Pemilu 1971. Arsip tersebut memudahkan peneliti untuk menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan Pemilu 1971. Arsip tersebut belum didigitalisasi dan berupa kertas yang sudah berumur, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemilihan Umum pada tahun 1981.

Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik intern untuk mengetahui kredibilitas sumber. Peneliti menemukan bahwa isi dari arsip tersebut bisa dipercaya sepenuhnya. Arsip tersebut diantaranya berisi tentang UU yang mengatur jalannya pemilu dan tata cara pelaksanaannya.

### **4. Interpretasi**

Intepretasi merupakan tahap keempat dalam penelitian sejarah. Intepretasi juga disebut dengan penafsiran. Tujuan dari tahapan ini ialah untuk menafsirkan sumber-sumber yang telah diverifikasi sebelumnya. Intepretasi memiliki dua macam yaitu analisis dan sintesis.<sup>12</sup> Interpretasi sering disebut dengan biang subyektivitas.<sup>13</sup> Peneliti menilai bahwa surat kabar Merdeka merupakan lembaga pers independen yang mencoba untuk menjadi media yang netral bagi masyarakat.

### **5. Penulisan**

Tahapan terakhir dari kegiatan penulisan sejarah. Tahap penelitian ini menggunakan pikiran kritis analisis untuk menghasilkan sintetis dalam suatu penelitian utuh. Penelitian ini untuk mengetahui kebijakan politik dalam negeri Kabinet Pembangunan tahun 1968-1973.

## **II. Pembahasan**

### **A. Terbentuknya Kabinet Pembangunan I**

---

<sup>11</sup> Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

<sup>12</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 78.

<sup>13</sup> Kuntowijoyo, *ibid* hlm. 100.

## 1. Kondisi Politik Awal Pemerintahan Kabinet Pembangunan I

Transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru juga merupakan tantangan bagi Soeharto untuk mengambil langkah selanjutnya. Pergolakan politik tentu terjadi, karena orang-orang masa Orde Lama juga mempunyai pengaruh dalam perpolitikan saat itu, masih banyak orang pengikut Orde Lama yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Namun, Soeharto tidak serta merta melakukan pembaharuan yang didalamnya terdapat orang-orang Orde Lama dalam masa transisi tersebut. Sebagai pejabat presiden, Soeharto tetap menggunakan MPRS dan DPR-Gotong Royong (DPR-GR) bentukan Soekarno, hanya saja dia melakukan pembersihan di lembaga tertinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama.

Konflik partai politik era Soekarno masih terjadi pada akhir tahun 1960-an, tetapi kerangka politik berubah dengan cepat. Pada bulan April-Mei 1967, usaha untuk menghidupkan kembali Masyumi dengan nama yang berbeda dilakukan oleh para politisi Islam modernis. Soeharto tidak menyetujui usaha ini, karena baginya, para politisi Islam modernis di perkotaan sudah tercemar oleh pemberontakan dan fanatisme. Para tokoh muslim mencurigai pemerintah memiliki prasangka anti Islam secara diam-diam. Mereka melihat sebagian personel militer senior beragama Kristen dan agama personel-personel lainnya, khususnya presiden tampak lebih dekat dengan kebatinan. PNI dan NU semakin ditekan oleh pemerintah pada tahun 1967, seperti yang dilakukan terhadap sebagian militer. Banyak personel militer ingin memusnahkan apapun yang berhubungan dengan Orde Lama, dan karena itu mereka berharap bisa menghancurkan PNI. Tetapi Soeharto lebih memilih untuk memperlemah dan mengendalikan partai ini.<sup>14</sup>

Stabilitas politik Indonesia terganggu dengan adanya pemberontakan G 30 S, tetapi hal ini sedikit mulai dibenahi dan dikembalikan, sehingga tidak banyak gejolak politik dan membuat suhu politik di Indonesia memanas. Salah satu gejolak yaitu paska peristiwa pemberontakan PKI tersebut, masih ada anggota-anggota PKI yang melarikan diri. Daerah Blitar Selatan termasuk Malang Selatan, yang menimbulkan Operasi Trisula, dikarenakan PKI bernaung disana.

## 2. Proses Terbentuknya Kabinet Pembangunan I

Sebelum adanya Kabinet Pembangunan I, terlebih dulu ada Kabinet Ampera yang Disempurnakan. Kabinet Ampera berakhir dengan diadakannya sidang umum MPRS yang kelima pada tanggal 21 Maret-30 Maret 1968 di Jakarta, dalam sidang umum tersebut dihasilkan 8 ketetapan dua diantaranya yaitu,<sup>15</sup> Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968 yang menetapkan Soeharto sebagai presiden, dan Ketetapan MPRS Nomor XLI/MPRS/1968 yang menetapkan perlunya dibentuk Kabinet Pembangunan.

Sebagai realisasinya *reshuffle* ini terjadi pada tanggal 6 Juni 1968 terbentuklah kabinet baru yaitu Kabinet Pembangunan I dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968 dan Kabinet Ampera pada hari itu juga dinyatakan Demissioner.<sup>16</sup> Akhir dari Kabinet Ampera bukan dikarenakan keretakan politik ataupun adanya keretakan politik dalam badan

---

<sup>14</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 578-579.

<sup>15</sup> Ginandjar Kartasasmita, dkk, *30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid III 1965-1973*. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1976), hlm. 173-174.

<sup>16</sup> Ginandjar Kartasasmita, dkk, *op.cit.*, hlm. 178.

Kabinet Ampera melainkan karena adanya Presiden baru yaitu Jenderal Soeharto. Sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XLI/MPRS/1968 tertanggal 27 Maret 1968, kabinet baru tersebut bernama Kabinet Pembangunan.

### **3. Struktur dan Program Kerja Kabinet Pembangunan I**

Susunan Kabinet ini tidak jauh berbeda dengan susunan Kabinet Ampera, hanya ada beberapa orang baru di dalamnya. Sehingga komposisinya juga tidak jauh berbeda antara kedua kabinet ini. Hanya beberapa orang saja yang baru, yaitu:

- a. Laksda Budiarjo sebagai Menteri Penerangan.
- b. Prof. Dr. Ali Wardana sebagai Menteri Keuangan menggantikan Drs. Frans Seda yang menjadi Menteri Perhubungan.
- c. Manshuri, S.H. sebagai Menteri P & K menggantikan Sanusi Harjadinata. Sebenarnya dia pernah menjadi Deputy Menteri P & K pada Kabinet Ampera yang disempurnakan.
- d. Laksda Mursalin sebenarnya orang lama yang pernah menjadi Menteri/Wakil Ketua DPRGR.
- e. H.M.S. Mintareja, S.H. menjadi menteri Penghubung Pemerintah dengan MPR/DPRGR/DPA.

Program kerja Kabinet Pembangunan I tidaklah jauh berbeda dengan program Kabinet Ampera. Program kabinet ini ditetapkan oleh Ketetapan MPRS No. XLI/MPRS/1968. Program Kerja yang disebut dengan Panca Krida yang memfokuskan pada pembangunan stabilitas ekonomi dan politik,

## **B. PELAKSANAAN KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI KABINET PEMBANGUNAN I**

### **1. Kebijakan Pembangunan Kabinet Pembangunan I**

Pemerintah Orde Baru tidak hanya membangun citra bidang politik saja dalam kehidupan berbangsa dan negara, namun juga melakukan pembangunan di sektor ekonomi. Kekuatan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto menjadikan pembangunan ekonomi sebagai pusat perhatian utama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan dan harapan jika kehidupan ekonomi semakin baik, maka akan mempermudah langkah pemerintah Orde Baru dalam memperoleh dan memperkokoh legitimasi kekuasaan yang baru saja digenggam serta dapat merebut simpati dari rakyat.

Sejak awal, pemerintahan Orde Baru menyadari bahwa kebijakan anti-barat yang merupakan suatu ciri mencolok dari pemerintah Soekarno juga telah menimbulkan kesulitan bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru memutuskan untuk meninggalkan kebijakan memandang ke dalam yang hanya membawa kebangkrutan bagi Indonesia dan mengantikannya dengan kebijakan memandang keluar.<sup>17</sup>

Soeharto berprinsip bahwa pembangunan ekonomi memerlukan stabilitas keamanan baik secara nasional maupun regional. Indonesia segera memulihkan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, mensponsori pembentukan ASEAN dan kemudian menjadi motor penggerak organisasi regional tersebut. Tujuan jangka pendek Soeharto adalah mengendalikan inflasi, mestabilkan nilai rupiah, memperoleh hutang luar negeri, serta mendorong masuknya investasi luar negeri.

### **2. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)**

---

<sup>17</sup> Abdul Syukur, dkk, *Indonesia dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2009), hlm. 153.

Perjuangan-perjuangan dilakukan untuk menyatukan Irian Barat ke dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Perjuangan diplomasi dan konfrontasi militer dilakukan. Perjuangan penyatuan Papua melalui Tri Komando Rakyat (Trikorra) dan PEPERA diyakini keberhasilannya di Indonesia. Apalagi Trikorra menjadi momentum politik yang penting saat Belanda dipaksa untuk menandatangani perjanjian PBB yang dikenal dengan Perjanjian New York pada tanggal 15 Agustus 1962 tentang PEPERA.

Pelaksanaan PEPERA tidak melalui jalan yang mulus, adanya gerakan separatis yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang pertama kali muncul di Manokwari pada tahun 1964.<sup>18</sup> Gerakan ini muncul dikarenakan janji Belanda pada rakyat Papua untuk mendirikan suatu negara (boneka) yang terlepas dari Republik Indonesia. Sehingga hal ini juga memicu gerakan yang bersifat separatis.

Pelaksanaan PEPERA ini disaksikan oleh utusan Sekretaris Jendral PBB yaitu Duta Besar Ortis Sanz. Hasil dari PEPERA tersebut dilaporkan oleh Ortis Sanz kepada Sidang Umum PBB ke- 24, PBB menyetujui Resolusi Belanda, Malaysia, Muangthai, Belgia, Luxemburg, serta Indonesia agar PBB menerima hasil-hasil PEPERA yang telah dilaksanakan sesuai Deklarasi New York.<sup>19</sup> Sehingga Irian Barat (kemudian diganti nama menjadi Irian Jaya) tetap menjadi wilayah Indonesia.

### **3. Pelaksanaan Pemilu Tahun 1971**

#### **a) Golongan Karya (Golkar) dalam usaha kemenangan**

Kemenangan mutlak Golongan Karya (Golkar) dalam pemilu 1971 jelas tidak lepas dari rekayasa pemerintah, yang jelas bisa diketahui dengan pembagian jatah kursi yang jelas-jelas dominan ke Golkar dan ABRI. Sehingga peran orpol/parpol sangat dominan dalam menentukan anggota legislatif, sebaliknya rakyat kurang dapat berpartisipasi, sehingga bisa dikatakan bahwa anggota yang duduk di DPR bukanlah mewakili kepentingan rakyat melainkan kepentingan orpol/parpol.

Pada 11 Februari 1970 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri NO. 12/1969 dan PP No. 6 Tahun 1970, tentang larangan pegawai negeri menjadi anggota parpol, serta hanya boleh memberikannya kepada Golkar. Jika ingin terlibat dalam Golkar atau parpol, pegawai negeri harus mendapatkan izin khusus dari pemimpinnya.<sup>20</sup> Peraturan tersebut menjelaskan bahwa secara tidak langsung dan memaksa, mayoritas menjadi pendukung Golkar, sehingga kemenangan Golkar juga berasal dari birokrasi Departemen Dalam Negeri, yang mengelola pemilihan umum untuk mendukung Golkar secara tidak langsung menggunakan prinsip loyalitas tunggal.

#### **b) Hasil Pemilu 1971**

Pemerintah sudah siap melaksanakan pemilihan umum yang tertunda sebelumnya. Pada bulan November 1969, DPR-GR mengeluarkan undang-undang

---

<sup>18</sup> Tuhana Taufik, *Mengapa Papua Bergolak?*, (Yogyakarta: Gama Global Media, 2001), hlm. 120.

<sup>19</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Dkk, 30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid III 1965-1973*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1976), hlm. 200-201.

<sup>20</sup> Julian Boileau. (1983). "Golkar: Function Group Politics in Indonesia". Dalam Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma. (2012). "Propaganda Orde Baru 1966-1980", *Verleden*, Vol. 1 No, 1, hlm.42.

pemilihan umum yang menetapkan keanggotaan dari parlemen baru (DPR). DPR ditetapkan terdiri atas 360 kursi anggota yang dipilih, ditambah 100 anggota yang diangkat. Seluruh anggota parlemen ini menjadi bagian dari 920 anggota MPR bersama-sama dengan 207 militer dan anggota golongan fungsional yang dipilih oleh presiden, 131 anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 112 anggota yang dipilih menurut hasil perolehan suara partai pada pemilihan umum, dan 10 anggota yang dipilih dari partai-partai yang nantinya kurang berhasil.<sup>21</sup> Sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968 tentang Pemilihan Umum, maka paling lambat 5 Juli 1971 harus telah dilaksanakan Pemilihan Umum. Sebagai tindak lanjutnya, dalam program kabinet ini mempunyai program melaksanakan pemilu umum sebagai salah satu program dalam lima program Panca Krida Kabinet.

Sebagai realisasinya maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 15/1969 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 16/1969 tentang Kedudukan MPR, DPR, dan DPD. Pemilihan umum pertama sejak zaman Orde Baru ini berhasil dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971.<sup>22</sup> Pemilu tersebut juga merupakan pemilu yang kedua sejak kemerdekaan.

Pemilihan Umum diikuti oleh 10 Partai/Parpol-Golkar, yang masing-masing mendapatkan kursi untuk DPR RI sebagai berikut:

Tabel 1. Kursi Pemilihan Umum

No.	Nama Partai	Masing-masing kursi
1.	Partai Katholik	3 kursi
2.	Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)	10 kursi
3.	Partai Nahdlatul Ulama'	58 kursi
4.	Partai Muslimin Indonesia	24 kursi
5.	Golongan Karya (GOLKAR)	236 kursi (227 + 8 wakil Irian)
6.	Parkindo	7 kursi
7.	Murba	- Kursi
8.	PNI	20 kursi
9.	Perti	2 kursi
10.	IPKI	- Kursi
Jumlah		360 kursi

Sumber: Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 347.

#### 4. Penyederhanaan partai-partai

Ketetapan MPRS No. XXII/ MPRS/ 1966 tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan, dalam pasal 1 nya memerintahkan pemerintah bersama-sama DPRGR segera membuat undang-undang tentang kepartaian, keormasan dan kerayaan yang menuju pada penyederhanaan.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 584.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 219.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Partai Politik dalam Kerangka Pembangunan Politik di Indonesia*. (Surabaya: PT BINA ILMU, 1992). hlm. 92.

Sebelum sidang MPR 1973 sebenarnya sudah ada penyerdehanaan partai di Indonesia, sehingga di MPR dan DPR tidak ada Fraksi NU, Fraksi PNI dan sebagainya. Sehingga jumlah kepartaian Indonesia hanya 3 buah saja yaitu :

- 1) Golongan Karya (Golkar)
- 2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri atas NU, Parmusi, Perti, PSII yang kesemuanya partai islam yang berfungsi menjadi satu tanggal 5 Januari 1973 dengan nama Partai Persatuan Pembangunan.<sup>24</sup>
- 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari 5 partai yaitu, PNI, Parkindo, Partai Katholik, Murba, dan IPKI yang berfungsi menjadi satu tanggal 11 Januari 1973 dengan nama Partai Demokrasi Indonesia.<sup>25</sup>

### **C. BERAKHIRNYA KABINET PEMBANGUNAN I**

#### **1. Dampak dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan**

##### a) Kebijakan Pembangunan Kabinet pembangunan I

PELITA I menghasilkan pertumbuhan PDB rata-rata 9,4% yang berarti dua kali lipat dari yang direncanakan. Tetapi pertumbuhan itu terutama karena ekspor produk primer. Dua sektor utama selama REPELITA I adalah kehutanan yang tumbuh 21,4% dan pertambangan 16,1%. Sektor konstruksi juga tumbuh 21,4% pertahun.<sup>26</sup> Sehingga bisa dikatakan kebijakan kabinet ini awalnya menuai hasil yang cukup bagus dan mendapat apresiasi serta hati rakyat.

Bantuan selanjutnya datang dari Amerika Serikat, hampir 50 % dari bantuan diberikan dalam bentuk kredit komoditi pangan. Bantuan juga datang dalam bentuk investasi asing. Antara tahun 1967 dan 1972 pemerintah meyetujui investasi asing sejumlah 2.488,4 juta dollar, yang terpakai hanya 710,4 juta dollar saja.<sup>27</sup>

Namun prestasi dalam kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan tinggi itu tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah-masalah dasar ekonomi Indonesia, bahkan beberapa masalah diantaranya menjadi lebih gawat. Masalah masalah tersebut antara lain, adalah pengangguran, kebangkrutan bisnis pribumi, dan pengusaha birokrat. Disisi lain, keberhasilan tersebut tidak mampu menyelesaikan hutang negara sebelumnya.

##### a) Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)

Penentuan pendapat rakyat (PEPERA) merupakan hasil nyata perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan RI atas wilayahnya, yaitu Irian Barat. Dengan adanya penentuan pendapat rakyat ini Irian Barat berhasil menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dikemudian hari timbul protes dari dalam dan luar negeri mengenai cara pelaksanaan PEPERA, dan desakan agar hasilnya dibatalkan.<sup>28</sup> Sejumlah lembaga swadaya masyarakat luar negeri dan beberapa

---

<sup>24</sup> Ginandjar Kartasmita, dkk, *op.cit.*, hlm. 241-242.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 242-243.

<sup>26</sup> Mohtar Mas'Oed, *Ekonomi dan Strukur Politik Orde Baru 1966-1971.* (Jakarta: Penerbit LP3S, 1989), hlm.113.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 109-110.

<sup>28</sup> Jusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1988.* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), hlm.122

kelompok masyarakat Irian Barat mendesak diadakan kembali suatu proses penentuan nasib sendiri dengan menggunakan sistem pemilihan langsung satu orang satu suara tanpa melalui perantara.

Pelaksanaan PEPERA, terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan *New York Agrrement*.<sup>29</sup> Adanya demonstrasi yang menuntut agar penyelenggaraan PEPERA, dilaksanakan secara One Man One Vote atau setiap orang memberikan suara, tidak secara musyawarah yang dilakukan oleh Dewan Musyawarah Papua (DMP).

Tahun 1970, muncul Gerakan Papua Merdeka (OPM)<sup>30</sup> yang dimotori oleh Asep Demotekay, ia memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat. Namun menggunakan jalur yang kooperatif dengan pemerintah. Ia mengajak pengikutnya untuk tetap sabar, ia berkeyakinan suatu saat nanti Irian Barat akan merdeka. Dan melarang tindakan radikal dalam mencapai kemerdekaan Irian Barat.<sup>31</sup> Gerakan OPM tersebut dilakukan secara radikal, yang dimotori oleh Terianus Arronggear hingga Kabinet Pembangunan I berakhir gerakan ini tetap ada, bahkan hingga sekarang.

#### b) Pemilu 1971

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 1971 merupakan salah satu keberhasilan yang dicapai masa Kabinet Pembangunan I ini, setelah pemilu tahun 1955. Pemilu secara sederhana dapat diartikan sebagai pemberian suara oleh rakyat, untuk memilih wakil-wakil rakyat. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu 1971 diwarnai rekayasa penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Dalam pemilihan umum 1971 Golkar mendapatkan kemenangan secara mutlak atas partai politik lainnya. Terlepas dari bagaimana proses kemenangan tersebut, terlihat bahwa pamor partai politik semakin menurun. Tidak saja di lembaga legislatif mereka tergolong minoritas, walaupun berkoalisi dengan semua partai sekalipun, begitu pula di eksekutif.

Menghadapi situasi yang sangat menekan dan tidak *fair* tersebut, para mahasiswa yang sebelumnya menjadi patner militer dalam menumbangkan Orde Lama kini berbalik memprotes pemerintah Orde Baru. Seiring dengan diselenggarakan kampanye untuk pemilihan umum, mahasiswa secara serentak menyatakan diri sebagai golongan putih (Golput) pada tanggal 28 Mei 1971, dan kemudian melancarkan kampanye sendiri guna memperluas dukungan terhadap tindakan yang mereka ambil tersebut diikuti oleh masyarakat. Gerakan ini terjadi di Jakarta dan menjalar ke Bandung, Bogor, Surabaya, serta Yogyakarta.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *New York Agrrement*, perjanjian yang berisi tentang nasib Irian Barat, yaitu PEPERA (*Self of Determination*) yang disahkan pada tahun 1962.

<sup>30</sup> OPM terdiri dari dua fraksi, yaitu gerakan yang dipelopori oleh Aser Demotokoy berdiri 1970 pasca Pepera yang memperjuangkan kemerdekaan Irian Barat secara kooperatif dengan Indonesia, yang kedua dimotori oleh terianus Aronggear yang berdiri sejak 1964, berjuang secara radikal baik secara politik maupun fisik senjata. Lihat selengkapnya dalam Tuhana Taufiq, *Mengapa Papua Bergolak?*. (Yogyakarta: Gama Global Media, 2001), hlm. 121-122.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>32</sup> Ipong S. Azhar, *Benarkah DPR Mandul: Pemilu, Parpol, dan DPR Masa Orde Baru*. (Yogyakarta: Bigrif Publishing, 1997), hlm. 87.

### c) Penyederhanaan partai-partai

Penyederhanaan partai merupakan program pemerintah yang sudah terencana sejak tahun 1970. Namun baru terlaksana pada tahun 1973 setelah pemilu 1971. Tentu saja proses fusi partai tidaklah serta merta mudah dilakukan, karena bukan hanya menggabungkan berbagai partai menjadi satu namun menggabungkan pula berbagai ideologi. Selain hal tersebut, tiap-tiap partai memiliki kepentingan politik tersendiri.

Fusi partai tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Hal ini terlihat jelas terlihat ditransfernya konflik-konflik yang sejak semula telah terjadi diantara kesembilan partai tersebut, ke dalam konflik-konflik internal dalam tubuh masing-masing partai baru yaitu PPP dan PDI.<sup>33</sup> Langkah untuk meminggirkan partai-partai lain lewat kebijakan fusi partai pada 1973, melahirkan dua partai pelengkap Golkar, yaitu Partai Persatuan Pembangunan/PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia/PDI. Pasca fusi partai keberadaan partai politik PPP dan PDI semakin meredup, dan Golkar kian kokoh.

### 2. Proses berakhirnya kabinet

Soeharto diangkat menjadi presiden 1968 dan dibentuknya Kabinet Pembangunan yang memiliki masa jabatan Presiden dalam kurun waktu lima tahun dan berakhir pada tahun 1973. Sehingga dibutuhkan pergantian kepemimpinan atau kabinet. Praktikanya dilapangan, Soeharto merupakan calon tunggal dalam pemilihan presiden melalui sidang MPR. Dengan adanya Pemilu 1971, maka pertama kali RI mempunyai MPR tetap, MPR tidak lagi bersifat sementara. Pimpinan MPR dan DPR hasil pemilu 1971 berada di tangan Idham Chalid (PPP). Sidang MPR yang pertama diadakan di bulan Maret 1973. Berikut ini adalah keputusan-keputusan yang penting.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Kondisi politik masa transisi kekuasaan hingga awal Pemerintahan Kabinet Pembangunan I merupakan suatu kondisi politik yang tidak stabil. Pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Lama juga merupakan suatu lompatan yang jauh dan perubahan yang sangat signifikan dalam suatu tatanan didalamnya. Pergolakan politik jelas terjadi didalamnya, dengan turunnya Soekarno dari jabatan Presiden tidak serta merta orang-orang pendukung Soekarno mengikuti Soeharto. Hal inilah yang menjadikan kebijakan-kebijakan politik yang dibuat mendukung ide-ide Orde Baru. Seperti melakukan pembersihan lembaga tertinggi negara dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama.

Pemerintahan Soeharto menggunakan sistem sentralistik, yaitu pemusatan kekuasaan oleh pusat. Sehingga kontrol terhadap daerah mudah dilakukan. Selain itu mayoritas daerah juga dipimpin oleh orang-orang militer pendukung Soeharto. Pergolakan politik oleh partai juga terjadi, Partai masyumi yang akan dibangun embali tai dilarang oleh pemerintah, karena politisi modern dianggap indentik dengan pemberontakan dan fanatisme. Hal ini lah yang menyebabkan kecurigaan bahwasanya

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Partai Politik dalam Kerangka Pembangunan Politik di Indonesia*. (Surabaya: PT BINA ILMU, 1992). Hlm. 94.

pemerintah anti islam. Di lain sisi, militer ingin menumpas apapun yang berbau Orde lama. Sehingga mereka berharap bisa menumpas PNI. Tetapi Soeharto memilih melemahkan partai tersebut.

Dengan adanya pemberontakan G 30 S stabilitas politik di Indonesia terganggu, tetapi hal ini sedikit mulai dibenahi dan dikembalikan, sehingga pada masa pemerintahan Kabinet Pembangunan I ini tidak banyak terjadi gejolak politik dan membuat panas suhu politik di Indonesia. Kestabilan politik nampak pada usia kabinet ini, yang berumur panjang yaitu 5 tahun (1968-1973) sesuai dengan masa jabatan presiden, merupakan umur yang belum pernah dicapai oleh kabinet-kabinet sebelumnya.

Pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri dan dampaknya, merupakan suatu kebijakan yang bertujuan menjalankan pemerintahan Kabinet Pembangunan I, khususnya dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam negeri. Kebijakan tersebut berkaitan erat dengan program kerja kabinet itu sendiri yaitu Panca Krida yang dijabarkan dalam lima pembahasan antara lain, pembangunan ekonomi, Pepera (penentuan pendapat rakyat), pemilihan umum, dan penyederhanaan partai menjadi tiga partai saja. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mengatasi krisis moneter, yang telah terjadi pasca pemberontakan G 30S tahun 1965, serta akibat hutang Soekarno yang digunakan dalam proyek mercusuarinya. Namun disisi lain pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto saat itu dan untuk memperoleh simpati serta dukungan dari rakyat.

Pepera (penentuan pendapat rakyat) merupakan kelanjutan usaha pengembalian Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pepera merupakan penentuan akhir bagi Irian Barat sendiri untuk bersatu dengan NKRI atau sebaliknya bersatu dengan Belanda. Perjuangan pengembalian Irian Barat melalui usaha yang sulit baik secara fisik maupun non fisik yaitu perundingan dengan waktu yang sangat lama. Konfrontasi fisik dan perundingan telah dijalankan dengan pihak Belanda dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yang berujung pada Perjanjian *New York* pada tanggal 15 Agustus 1962 mengenai pelaksanaan PEPERA. PEPERA yang akan dilaksanakan pada tahun 1969, dibawah pengawasan PBB.

Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang pernah dilaksanakan oleh Pemerintahan Indonesia semenjak merdeka. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 1968 ini nyatanya terlaksana pada tahun 1971. Dalam waktu itu pula, Soeharto beserta pengikutnya berusaha supaya Golkar dapat memenangkan pemilu pada akhirnya.

Tahun 1973 pemerintah mencetuskan penyederhanaan partai yang rencana tersebut sudah dimulai sejak 1970. Dari sepuluh partai yang diakui menjadi tiga partai saja yaitu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar). Yang awalnya gagasan penyederhanaan partai itu tidak hanya berarti pengurangan jumlah partai, akan tetapi juga merupakan langkah untuk perombakan pola dan pola kerja kepartaian, dengan tetap mengaktifkan hak-hak politik rakyat, artinya rakyat sebagai pemegang kedaulatan tetap dijamin secara konstitusional untuk berpartisipasi melalui partai politik.

Pembangunan berhasil dilaksanakan kabinet ini, dengan keberhasilannya mengatasi masalah inflasi. Namun keberhasilan tersebut tidak secara kolektif dapat mengatasi permasalahan dasar ekonomi saat itu. permasalahan tersebut seperti masalah pengangguran, dan kebangkrutan pengusaha pribumi.

PEPERA berhasil dilaksanakan dan sukses sehingga Irian Barat berintegrasi menjadi wilayah Indonesia. Namun ada kekecewaan dari sebagian pihak, atas pelaksanaan PEPERA yang tidak sesuai dengan *New York Agreement*. Dibalik itu semua, ada unsur kepentingan politik di dalamnya. Pelaksanaan PEPERA dan pasca pelaksanaan juga diwarnai dengan kondisi yang tidak kondusif, penuh dengan gejolak dan pertentangan dari berbagai kelompok yang mencurigai adanya ketidak beresan dalam pelaksanaan.

Pemilu 1971, merupakan pemilu yang diwarnai dengan rekayasa pemerintah, dengan kemenangan mutlak oleh Golkar. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya Pemilu 1971 merupakan pemilu semu, bukan merupakan demokrasi itu sendiri. Pemilu yang diwarnai dengan kecurangan baik sebelum dan pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Penyerderhanaan partai dilaksanakan dan tetap mengedepankan hak-hak dan partisipasi rakyat. Namun praktik dilapangan tidak demikian. Adanya kebijakan yang berupa larangan partai politik masuk ke tingkat desa, hal tersebut jelas menjauhkan rakyat dari politik, begitu juga dengan partai politik yang akan semakin melemah dengan kurangnya kaderisasi partai-partai politik tersebut.

Kabinet pembangunan I merupakan kabinet yang paling stabil dari kabinet-kabinet sebelumnya, hal ini dilihat dari masa pemerintahannya paling lama yaitu 1969-1973. Tanpa adanya perombakan dalam kabinetnya. Meskipun pelaksanaan pemerintahan kabinet ini secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai pemerintahan yang demokrasi namun didalamnya hanya ada demokrasi semu saja. Dan kembali lagi kepada kepentingan pemerintah itu sendiri bukan untuk kepentingan rakyatnya. Sesuai dengan masa pemerintahan Kabinet ini dilanjutkan dan disempurnakan oleh pemerintahan Kabinet Pembangunan II.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- [1]. Abdul Syukur, Dkk. (2009). *Indonesia dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- [2]. Bambang Sunggono. (1992). *Partai Politik dalam Kerangka Pembangunan Politik di Indonesia*. Surabaya: PT BINA ILMU.
- [3]. Bibit Suprpto. (1985). *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [4]. Departemen Penerangan. (1970). *Susunan Kabinet dan Program Kabinet RI Selama 25 Tahun 1945-1970*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- [5]. Ginandjar Kartasasmita, Dkk. (1976). *30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid III (1965-1973)*. Jakart: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- [6]. Ipong S. Azhar. (1997). *Benarkah DPR Mandul: Pemilu, Parpol, dan DPR Masa Orde Baru*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

- [7]. Jusuf Wanandi. (2014). *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1988*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- [8]. Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- [9]. \_\_\_\_\_. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- [10]. Moedjanto. (1988). *Indonesia Abad ke-20: Dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai PELTA III*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- [11]. Mohtar Mas'Oed. (1989). *Ekonomi dan Strukur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: Penerbit LP3S.
- [12]. \_\_\_\_\_. (1990). "Pembangunan Ekonomi dan Peran Serta Masyarakat". Dalam Akhmad Zaini Abar. *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru: Esai-esai dari Fisipol Bulaksumur*. Solo: CV. Ramadhani.
- [13]. Sardiman A.M. (2004). *Mengenal Sejarah*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- [14]. Suhartono W. Pranoto. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [15]. Suwarno.( 2012). *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- [16]. Tuhana Taufik. (2001). *Mengapa Papua Bergolak?*. Yogyakarta: Gama Global Media.

#### Jurnal

- [17]. Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma. (2012). "Propaganda Orde Baru 1966-1980", *Verleden*, Vol. 1 No, 1, hlm.42.

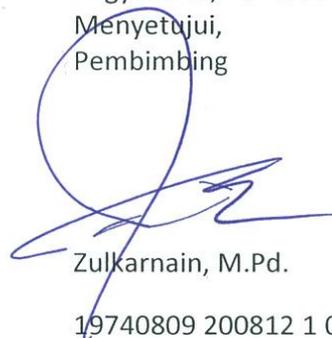
Reviewer



Dr. Aman, M.Pd.

NIP. 19741015 200312 1 001

Yogyakarta, Oktober 2016  
Menyetujui,  
Pembimbing



Zulkarnain, M.Pd.

19740809 200812 1 001